

PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA DI DESA LEUWIKUJANG KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA

Ahmad Gianul Mushlih¹, Suryadi², Amelia Dwi Handayani³

¹²³Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Alamat Korespondensi : ahmadgianulmushlih@gmail.com

Abstract: *Limited human resources are an obstacle in the management of Village Tourism in Leuwikujang Village in utilizing natural potential as a tourist attraction. In 2020, this natural potential became an alternative to climbing when the majority of mountain climbing was closed, so that management could not be carried out by one actor. This study aims to determine the role and relationship of stakeholders interactions in the management of Leuwikujang Tourism Village. The method used in this research is descriptive qualitative with observation, interviews, and documentation in data collection. The results of this study are the role of stakeholders divided into three, namely 1) primary stakeholders consisting of four actors who act as coordinators, facilitators, and implementers, 2) key stakeholders consisting of three actors who act as policy creators, coordinators, and facilitators, 3) secondary stakeholders consisting of four actors who act as coordinators and facilitators. Stakeholders interaction relationships in the management of Tourism Villages in Leuwikujang Village are shown through mutualistic partnerships that provide benefits or positive impacts on each other.*

Keyword: *The Role of Stakeholders, Tourism Village Management, Community Based Tourism.*

Abstrak: Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang dalam memanfaatkan potensi alam sebagai objek wisata. Pada tahun 2020, potensi alam tersebut menjadi alternatif pendakian saat mayoritas pendakian gunung ditutup, sehingga dalam pengelolaannya tidak dapat dilakukan oleh satu aktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hubungan interaksi *stakeholders* dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian ini adalah peran *stakeholders* terbagi menjadi tiga yaitu 1) *stakeholders* primer terdiri dari empat aktor yang berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan implementer, 2) *stakeholders* kunci terdiri dari tiga aktor yang berperan sebagai policy creator, koordinator, dan fasilitator, 3) *stakeholders* sekunder terdiri dari empat aktor yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator. Hubungan interaksi *stakeholders* dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang ditunjukkan melalui kemitraan mutualistik yang memberikan manfaat atau dampak positif satu sama lain.

Kata kunci: Peran *Stakeholders*, Pengelolaan Desa Wisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Pendahuluan

Pemanfaatan sumber daya alam tidak terlepas dari adanya peran dan kontribusi dari berbagai aktor, baik aktor negara maupun aktor non negara. Dalam hal ini keterlibatan aktor dalam sebuah program atau kegiatan pengembangan

masyarakat dapat disebut juga sebagai *stakeholders* (Hidayah, 2018). *Stakeholders* merujuk kepada semua pihak dalam masyarakat yang terlibat dalam isu atau permasalahan yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan, kebijakan, dan tujuan tertentu (Fairuza, 2017; Talib, 2020; Ardiansyah, 2021). *Stakeholders* yang terlibat secara langsung dalam kemitraan membangun kepercayaan dan keselarasan posisi agar kemitraan tersebut berhasil dan berkelanjutan (Yunus et al., 2017; Radic & Kuswandi, 2021). Dalam hal ini hubungan antar *stakeholders* yang terlibat salah satunya dapat diaplikasikan melalui pengelolaan pariwisata di daerah perdesaan.

Pariwisata perdesaan menawarkan daya tarik alami yang unik yang tidak tersedia di perkotaan, sehingga menarik wisatawan berkunjung dan diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan di daerah perdesaan (Hekmatyar, 2021; Maulina et al., 2022). Pariwisata di perdesaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bisa menjadi sektor kunci dalam pembangunan berkelanjutan jika dikelola dengan baik (Junaid & M. Salim, 2019; Maulina et al., 2022). Hingga kini, pariwisata masih dianggap sebagai kegiatan kreatif melalui konsep pariwisata kerakyatan atau yang disebut pariwisata pro rakyat (Pantiyasa, 2020). Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata, melalui kesadaran kolektif dan masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam mengontrol potensi wisata (Briliyanti, 2021).

Untuk mewujudkan harapan itu, merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 yang menekankan bahwa kepariwisataan adalah hasil dari unsur kerja sama antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan regulasi, yang bertujuan untuk menciptakan peran yang setara demi kemajuan pariwisata. Maka dari itu, sebagai unsur mendasar dalam pengelolaan wisata, diperlukan sebuah kolaborasi antar pihak yang dalam hal ini salah satu representasinya melalui pembangunan Desa Wisata.

Pariwisata Inti Rakyat (PIR) tentang Desa Wisata Tahun 1999 (dalam Wibowo, 2019) menyatakan Desa Wisata menawarkan pengalaman autentik secara ekonomi, sosial budaya, dan arsitektur atau struktur tata ruang desa yang unik, serta memiliki berbagai komponen pariwisata menarik yang bisa dikembangkan seperti atraksi, akomodasi, kuliner, dan layanan lainnya. Desa Wisata mendorong pariwisata berbasis masyarakat dengan memperkaya produk wisata melalui kearifan budaya lokal yang terwujud dari nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong, yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan, sehingga tidak hanya fokus pada perekonomian masyarakat (Sari & Rifai, 2020; Wirdayanti et al., 2021). Secara umum, Desa Wisata telah terbentuk dan ditetapkan di beberapa daerah terutama di Kabupaten Majalengka.

Menurut data dari Jadesta Kemenparekraf (2024), 31 desa dan kelurahan di Kabupaten Majalengka telah dinyatakan sebagai Desa Wisata, di mana 18 di antaranya telah diverifikasi oleh Kemenparekraf. Salah satu Desa Wisata di Kabupaten Majalengka yang notabene terletak di kawasan dataran rendah dengan potensi alam yang layak dijadikan sebagai objek wisata adalah Desa Wisata Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Desa Wisata Leuwikujang sendiri telah ditetapkan sebagai Desa Wisata pada tahun 2021 oleh Kemenparekraf melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Letak Desa Wisata Leuwikujang berjarak 22 km dari pusat kota Kabupaten Majalengka dan 29 km dari pusat Kota Cirebon. Daya tarik dari Desa Wisata Leuwikujang yakni kawasan wisata alam berupa wilayah hutan perbukitan yang diberi nama Situs Wana Wisata Bukit Sanghyang Dora. Dalam hal ini keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang yang belum terstruktur dalam memanfaatkan potensi alam sebagai objek wisata.

Pada tahun 2020, Situs Wana Wisata Bukit Sanghyang Dora menjadi alternatif pendakian saat mayoritas jalur pendakian gunung di Indonesia ditutup karena pandemi Covid-19. Meskipun awalnya pengunjung datang dengan antusiasme yang tinggi, namun jumlah pengunjung kemudian menurun karena pengalaman yang disuguhkan tidak membangkitkan keinginan untuk kembali. Pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang tidak dapat dilakukan oleh satu aktor, sehingga memerlukan strategi yang melibatkan kolaborasi antar *stakeholders* yang mendukung dalam terlaksananya program Desa Wisata. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Siak, pengelolaan sumber daya alam melibatkan tujuh *stakeholders* yang berperan serta menjalin hubungan baik untuk mewujudkan program Siak Hijau (Subhan et al., 2022).

Kolaborasi antar *stakeholders* juga dilakukan di Kota Pekanbaru dalam mengembangkan potensi wisata, dalam hal ini keterlibatan antar *stakeholders* perlu ditingkatkan dalam pengawasannya untuk mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai *Smart City Madani* (Vani et al., 2020). Tak hanya itu, keterlibatan antar *stakeholders* juga terjadi dalam pengembangan wisata di Kebun Raya Cibinong Kabupaten Bogor yang telah terbukti efektif, dengan setiap pihak memainkan peran sesuai tanggung jawabnya, sehingga mempercepat pembangunan pariwisata dan memberikan dampak positif pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Berliandaldo et al., 2021). Selain itu, adanya sikap kerja sama yang produktif antar *stakeholders* dalam penanganan sampah di Desa Pangenan Cirebon melalui praktik *Corporate Social Responsibility* yang melibatkan enam *stakeholders*. Namun, konsistensi dari semua pihak terlibat perlu ditingkatkan agar masalah sampah dapat dikelola secara bijaksana (Harlyandra & Kafa, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu merupakan gambaran bagi peneliti, karena studi mengenai peran *stakeholders* dalam sektor pariwisata telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun terdapat perbedaan penelitian, karena dalam penelitian ini kolaborasi antar *stakeholders* terjadi melalui gerakan akar rumput yang terbentuk dalam kelompok masyarakat secara kolektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi peran *stakeholders* dan kategorinya serta hubungan antara *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Kerangka Teori

Konsep Stakeholders

Menurut Kristin dan Salam (dalam Talib, 2020) *stakeholders* adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan atau

program pembangunan, serta turut terlibat atau dapat dipengaruhi olehnya, baik dalam konteks positif maupun negatif. Lebih lanjut dalam pandangan Hetifah (dalam Arafat *et al.*, 2022), *stakeholders* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi, serta secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu rencana atau program yang telah disusun. Berdasarkan kepentingan dan pengaruh, Reed *et al* (dalam Christmawati & Pramono, 2021) membagi *stakeholders* menjadi empat kategori antara lain:

1. Subjek (*Subject*) artinya *stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang rendah.
2. Pemain Kunci (*Key Player*) adalah *stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
3. Pengikut Lain (*Crowd*) yaitu *stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
4. Pendukung (*Contest Setter*) merupakan *stakeholders* yang memiliki kepentingan rendah dan pengaruh yang tinggi.

Identifikasi Stakeholders

Maryono (dalam Muslimawati & Setiyono, 2023) mengidentifikasi *stakeholders* menjadi tiga kelompok diantaranya:

1. *Stakeholders* Primer merujuk kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan dan terlibat secara langsung dalam proses perencanaan suatu inisiatif atau proyek. *Stakeholders* ini dianggap krusial karena kontribusi diperlukan sepanjang seluruh proses perencanaan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek tersebut.
2. *Stakeholders* Kunci adalah pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk membuat keputusan secara hukum berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. *Stakeholders* ini memiliki hak untuk memengaruhi arah dan hasil dari suatu kegiatan atau keputusan tertentu karena posisi atau kewenangan mereka yang sah dalam konteks hukum dan regulasi.
3. *Stakeholders* Sekunder adalah pihak-pihak yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan suatu program atau inisiatif, meskipun tidak memiliki kepentingan langsung dalam program tersebut. Namun demikian, peran *stakeholders* ini bisa menjadi penting karena dukungan atau kontribusinya dapat memengaruhi hasil atau implementasi dari program tersebut secara tidak langsung.

Peran Stakeholders

Nugroho (dalam Arafat *et al.*, 2022) mengklasifikasikan peran *stakeholders* menjadi lima kelompok diantaranya:

1. Policy Creator adalah *stakeholders* yang memiliki otoritas dan pengaruh besar dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan. Peran ini biasanya memiliki pengetahuan khusus atau keahlian dalam bidang tertentu dan berperan penting dalam menentukan arah serta hasil dari kebijakan yang

dibuat, konsultasi dengan *stakeholders* lain, dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan.

2. Koordinator adalah *stakeholders* yang mengelola hubungan dan komunikasi antara berbagai pihak terlibat dalam suatu proyek atau inisiatif. Koordinator memfasilitasi kerjasama dan koordinasi tim, dengan tanggung jawab utama meliputi pengaliran informasi serta keputusan yang efektif di seluruh pihak yang terlibat.
3. Fasilitator adalah *stakeholders* yang bertugas memastikan bahwa kebutuhan yang mendukung pencapaian tujuan dapat dipenuhi dengan baik. Fasilitator berperan dalam mengelola proses dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau inisiatif serta membangun pemahaman dan kesepahaman di antara *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.
4. Implementer adalah *stakeholders* yang bertugas sebagai pelaksana langsung dari sasaran atau kegiatan yang telah dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya. Implementer memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan tugas-tugas operasional dan teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek atau inisiatif memastikan bahwa semua langkah dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
5. Akselerator adalah *stakeholders* yang berperan dalam memfasilitasi dan mempercepat pelaksanaan suatu program atau inisiatif agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Akselerator juga memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya, dukungan, atau keterampilan khusus yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu yang tepat.

Hubungan Antar Stakeholders

Dalam hubungan antar *stakeholders* yang terlibat, merujuk pada teori kemitraan, *stakeholders* yang terlibat dapat dikaji menggunakan pola kemitraan. Sulistiyani (dalam Handayani & Warsono, 2017) menyatakan bahwa kemitraan diadopsi dari kata *Partnership* yang artinya sikap kerja sama antar individu atau antar kelompok yang memiliki tujuan sama. Menurutnya, kemitraan dibedakan menjadi tiga model antara lain:

1. Kemitraan Semu adalah jenis persekutuan antara dua pihak atau lebih di mana kerja sama tidak seimbang antara mereka.
2. Kemitraan Mutualistik merupakan jenis persekutuan di mana dua pihak atau lebih saling memberikan dan menerima manfaat, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal.
3. Kemitraan Konjugasi adalah tipe kemitraan yang menyerupai seperti "Paramecium", dimana dua pihak melakukan pertukaran energi sebelum berpisah dan dapat melakukan pembelahan diri.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Desa Wisata Leuwikujang, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di Desa Wisata Leuwikujang, wawancara semi terstruktur dengan informan terkait, dan dokumentasi berupa dokumen arsip dan foto. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa jurnal ilmiah, skripsi, serta buku yang relevan.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan dalam penelitian ini, yang berarti informan dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang memiliki pengetahuan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang dan dirasa memiliki kemampuan serta mengetahui prosesnya, yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sebagai bentuk memverifikasi kredibilitas data, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber untuk memeriksa informasi dan melakukan *cross check data*.

Hasil dan Pembahasan

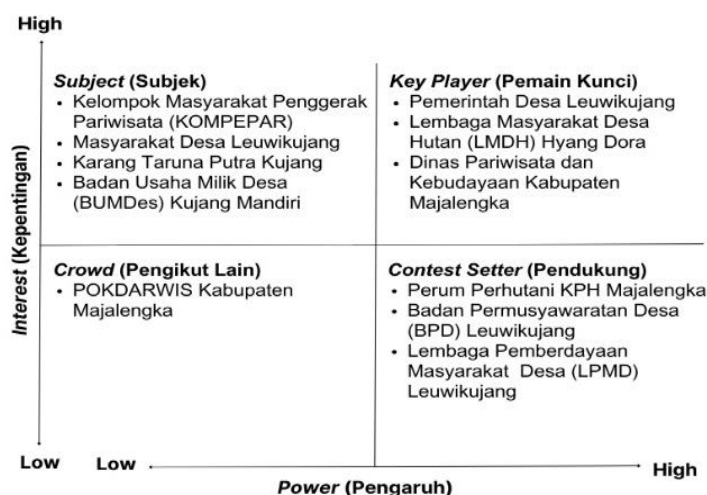
Desa Wisata Leuwikujang

Sebagai salah satu Desa Wisata di Kabupaten Majalengka, Desa Leuwikujang memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik bagi wisatawan, antara lain wisata alam *river tubing* sungai Cijeeng dan Ciwaringin, serta Situs Wana Wisata. Dalam hal ini, “Situs” yang berarti itu adalah Cibaringkeng sebagai objek kearifan lokal dan “Wana” yang berarti lokasinya berada di kawasan hutan, serta “Wisata” yaitu Bukit Enjoy dan Bukit Sanghyang Dora sebagai tempat *camping ground* dengan ketinggian sekitar 396 Mdpl. Untuk sampai menuju puncak Bukit Sanghyang Dora, terdapat beberapa pos yang harus dilewati diantaranya *Basecamp*, Pos 1 Bukit Kayas, Tanjakan Saklek, Pos 2 Krapyak, Tanjakan Ragola, Pos 3 Bukit Panangisan, Pos 4 Lebak Lutung, dan terakhir Puncak Pass Bukit Sanghyang Dora.

Desa Leuwikujang memiliki potensi lokal yang baik, hal ini dibagi menjadi lima wilayah berbeda diantaranya kampung wisata di Tetelar Kaler, kampung seni di Dukuh Sawah, kampung adat di Leuwibadak, kampung UMKM dan modern di Blok Desa, dan kampung santri di Rimbo atau Pamujaan. Selain itu, Desa Leuwikujang memiliki banyak potensi lainnya dalam aspek seni, budaya, kuliner, dan produksi lokal yang menjadi penentu dalam penetapan sebagai Desa Wisata. Aspek seni meliputi kuda renggong, sisingaan, dan burok, sementara aspek budaya mencakup guar bumi, munah, babacakan, tujuh bulanan, dan munjung. Aspek kuliner termasuk opak, tahu, dan gadung, sedangkan produksi lokal mencakup cempor dan boboko.

Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang

Pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang terbentuk melalui adanya interaksi sosial yang terjalin antara beberapa pihak terkait yang memiliki tujuan dan berkaitan dengan aktivitas wisata di Bukit Sanghyang Dora. Adapun aktor-aktor yang terlibat berdasarkan visualisasi pemetaan kategori *stakeholders* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Pemetaan Kategori Stakeholders

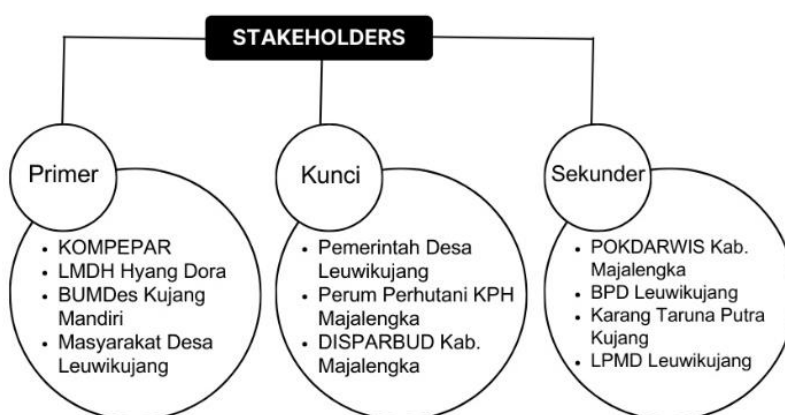
Berdasarkan Gambar 1 dijelaskan terdapat empat *stakeholders* yang menjadi subjek dalam konteks ini, di mana masing-masing aktor memiliki peran aktif dan kepentingan langsung di lapangan. KOMPEPAR, masyarakat, Karang Taruna Putra Kujang, dan BUMDes Kujang Mandiri berperan sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang, sehingga dikategorikan sebagai subjek.

Ditemukan tiga *stakeholders* yang menjadi pemain kunci dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang. Pemerintah Desa Leuwikujang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka memiliki peran penting sebagai sasaran dan pelaksana dalam menetapkan status Desa Wisata. Seperti halnya dua pihak tersebut, LMDH Hyang Dora juga memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar sebagai penghubung informasi antara pemerintah desa dengan Perum Perhutani Majalengka terkait kerja sama lahan kawasan hutan untuk objek wisata.

Meskipun POKDARWIS Kabupaten Majalengka menunjukkan kepedulian yang baik, namun kepentingan dan pengaruhnya tidak terlalu besar. Dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang, POKDARWIS Kabupaten Majalengka yang beroperasi di tingkat daerah berperan sebagai wadah untuk perkumpulan seluruh pengelola wisata di Kabupaten Majalengka. Hal ini menjadikan perannya memiliki keterbatasan dalam pengaruh dan kepentingan, sehingga tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan wisata di lapangan.

Dalam kategori pendukung terdapat tiga *stakeholders* yang terlibat, meskipun tidak memiliki kepentingan langsung, tetapi memiliki pengaruh dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang. Perum Perhutani yang memiliki pengaruh yang besar karena dalam hal ini sebagai pemilik lahan untuk objek wisata, BPD dan LPMD Leuwikujang pun memiliki pengaruh dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang karena sebagai mitra kerja sama pemerintah desa yang membantu dan mengawasi kelangsungan program Desa Wisata Leuwikujang.

Berdasarkan pemetaan kategori *stakeholders* dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang maka mengacu pada Maryono (dalam Muslimawati & Setiyono, 2023) *stakeholders* diidentifikasi menjadi tiga kelompok *stakeholders*. Adapun pembagian *stakeholders* dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Identifikasi Stakeholders

Berdasarkan Gambar 2 dijelaskan bahwa dari ketiga *stakeholders* yang terlibat sebagai aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang, masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, adanya interaksi sosial yang berperan diantara *stakeholders* menjadi kunci keberhasilan pembangunan Desa Wisata di Desa Leuwikujang yang menurut konsep Nugroho (dalam Arafat *et al.*, 2022) *stakeholders* yang terlibat memiliki peran sebagai *Policy Creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementer, Akselerator.

Stakeholders Primer

Dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang, aktor-aktor yang menjadi *stakeholders* primer ialah pihak yang merasakan dampaknya secara langsung baik secara positif maupun negatif dari adanya pembangunan Desa Wisata Leuwikujang. Adapun berikut ini adalah aktor-aktor dalam *stakeholders* primer yang terlibat pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang antara lain:

1. Kelompok Masyarakat Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR). Sebagai salah satu *stakeholders* yang terdampak langsung, KOMPEPAR berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan implementer dalam manajemen objek wisata Bukit Sanghyang Dora. Sebagai aktor penting di lapangan, KOMPEPAR menjadi penggerak utama dalam mengelola objek wisata tersebut.
2. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Hyang Dora. Kehadiran objek wisata Sanghyang Dora memberikan dampak positif bagi LMDH Hyang Dora, khususnya bagi masyarakat tani hutan berupa perbaikan akses jalan untuk memudahkan ekonomi hasil hutan. LMDH Hyang Dora berperan sebagai koordinator dan fasilitator yaitu berkoordinasi dengan Perum Perhutani KPH Majalengka dalam mengurus Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pemanfaatan kawasan hutan sebagai objek wisata.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kujang Mandiri. Status Desa Leuwikujang sebagai Desa Wisata tidak hanya menggarisbawahi potensi objek wisata yang menonjol, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan budaya masyarakat lokal. BUMDes Kujang Mandiri berperan sebagai fasilitator dan implementer dengan mendukung upaya Pemerintah Desa

Leuwikujang dalam memperkuat sektor ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan peternakan sapi.

4. Masyarakat Desa Leuwikujang. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Desa Wisata Leuwikujang telah memberikan dampak positif. Masyarakat berperan sebagai fasilitator dan implementer dengan bergabung dalam KOMPEPAR, serta aktif dalam kegiatan ekonomi dengan berdagang di kawasan objek wisata Bukit Sanghyang Dora.

Stakeholders Kunci

Dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang di Desa Leuwikujang, aktor-aktor yang menjadi *stakeholders* kunci ialah pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan secara hukum berdasarkan undang-undang atau peraturan lainnya. Adapun aktor-aktor dalam *stakeholders* kunci yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang diantaranya:

1. Pemerintah Desa Leuwikujang. Pemerintah Desa Leuwikujang memiliki kewenangan yang jelas berdasarkan peraturan yang berlaku. Perannya mencakup policy creator, koordinator, dan fasilitator. Hal ini tercermin dalam pengambilan keputusan dan kerja sama dengan DISPARBUD Majalengka untuk menetapkan status Desa Wisata Leuwikujang.
2. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Majalengka. Berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), dapat disimpulkan bahwa Perum Perhutani KPH Majalengka memiliki peran sebagai fasilitator. Perannya mencakup penyediaan lahan hutan seluas 7,70 Ha di petak 31a, 32a, 33e Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Leuwimunding, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ciwaringin untuk dijadikan Situs Wana Wisata Bukit Sanghyang Dora.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Majalengka. DISPARBUD Kabupaten Majalengka berperan dalam pembangunan Desa Wisata Leuwikujang sebagai policy creator dan koordinator. Peran yang mendukung Desa Wisata Leuwikujang dengan melakukan promosi wisata serta melakukan pengawasan rutin setiap bulan terhadap semua pengelola objek wisata, termasuk KOMPEPAR.

Stakeholders Sekunder

Dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang, aktor-aktor yang menjadi *stakeholders* sekunder atau pendukung adalah pihak yang memiliki kontribusi dan kepedulian terhadap keberhasilan pembangunan Desa Wisata, akan tetapi aktor tersebut tidak mempunyai kepentingan secara langsung. Berikut ini adalah aktor yang terlibat sebagai *stakeholders* sekunder dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang antara lain:

1. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kabupaten Majalengka. Peran POKDARWIS Kabupaten Majalengka dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang memiliki kepedulian yang baik, tetapi tidak memiliki kepentingan langsung. Sebagai koordinator, POKDARWIS Kabupaten

Majalengka menjadi pihak yang mewadahi pengelola wisata sebagai media bertukar informasi dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Majalengka.

2. Karang Taruna Putra Kujang. Dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang, Karang Taruna Putra Kujang ikut andil dengan berperan serta sebagai fasilitator. Kontribusinya yaitu terlibat dalam musyawarah perencanaan Desa Wisata dan mendukung kegiatan sosial budaya lokal yang ada di Desa Wisata Leuwikujang.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Leuwikujang. Peran BPD Leuwikujang dalam hal ini yaitu sebagai fasilitator. Salah satu cara BPD Leuwikujang dalam mengawasi program kegiatan Desa Wisata yaitu dengan ikut serta dalam musyawarah desa dan sebagian ikut bergabung sebagai anggota KOMPEPAR.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Leuwikujang. Sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat, seperti halnya BPD Leuwikujang, LPMD Leuwikujang pun memiliki peran dalam pengelolaan Desa Wisata yaitu sebagai fasilitator. Hal ini dapat diketahui bahwa peran LPMD Leuwikujang terlibat sebagai anggota KOMPEPAR untuk media penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Hubungan Antara Stakeholders dalam Pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang

Hubungan diantara aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang dilakukan melalui adanya innteraksi yang membentuk kerja sama berdasarkan atas kesadaran kolektif diantara *stakeholders* yang saling memberikan manfaat. Hubungan yang terjalin ini secara tidak langsung membentuk sebuah jaringan yang tercermin melalui kemitraan yang menurut Sulistiyani (dalam Handayani & Warsono, 2017) hubungan *stakeholders* dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang termasuk model kemitraan mutualistik. Adapun kemitraan mutualistik yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Hubungan Stakeholders dalam Pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang

Berdasarkan Gambar 3. dapat dilihat bahwa hubungan kemitraan diantara *stakeholders* seperti jaringan menunjukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat saling berkontribusi dan memberikan manfaat, sehingga tujuan dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang dapat dicapai. Hubungan interaksi dalam membentuk sistem kemitraan dilakukan antar berbagai *stakeholders* yang saling terkait diantaranya yaitu:

1. BPD Leuwikujang, LPMD Leuwikujang, Karang Taruna Putra Kujang, serta masyarakat dengan pemerintah Desa Leuwikujang bekerja sama dalam musyawarah perencanaan, yang mana hal ini bermanfaat karena pihak yang terlibat tersebut dapat ikut menjadi pelaksana yang berperan serta dalam mengelola Desa Wisata Leuwikujang.
2. Pemerintah Desa Leuwikujang berkolaborasi dengan DISPARBUD Majalengka dalam pengajuan status Desa Wisata ke Kemenparekraf, yang selain meningkatkan citra Desa Leuwikujang sebagai Desa Wisata, juga memperoleh pengawasan dari DISPARBUD Majalengka.
3. LMDH Hyang Dora bermitra dengan Perum Perhutani Majalengka dengan mengajukan penggunaan sebagian lahannya untuk kegiatan wisata yang dapat berdampak positif dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan bersama masyarakat dan menjaga kelestarian kawasan hutan.
4. LMDH Hyang Dora dengan KOMPEPAR. Sebagai ujung tombak dalam pelaksana wisata, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tani yang tergabung dalam LMDH Hyang Dora dari pengelolaan wisata yang terstruktur adalah adanya perbaikan akses jalan ke hutan yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.
5. BPD Leuwikujang, LPMD Leuwikujang, Karang Taruna Putra Kujang, dan masyarakat berkolaborasi dengan KOMPEPAR untuk mengelola Desa Wisata Leuwikujang. Mereka aktif bergabung dengan KOMPEPAR dalam mengawasi objek wisata di lapangan, saling berbagi informasi untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan pariwisata, dan memberikan akses ekonomi kepada masyarakat di kawasan wisata.
6. POKDARWIS Kabupaten Majalengka kolaborasi dengan KOMPEPAR, hal ini memberikan manfaat pada kedua belah pihak. KOMPEPAR mendapatkan pengarah dan pertukaran ide terkait pengelolaan wisata, sementara POKDARWIS mendapat respon positif atas tugas pokoknya dengan kesadaran daerah dalam memanfaatkan potensi wisata.

KOMPEPAR dengan BUMDes Kujang Mandiri dan Perum Perhutani Majalengka. Melalui pengelolaan wisata yang terstruktur di Desa Wisata Leuwikujang memberikan dampak positif secara keuntungan materi dari hasil retribusi di kawasan wisata juga keberlanjutan kawasan hutan milik Perum Perhutani dan Pemerintah Desa Leuwikujang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang yaitu diidentifikasi menjadi tiga yaitu *stakeholders* primer terdiri dari empat aktor, *stakeholders* kunci

terdiri dari tiga aktor, dan *stakeholders* sekunder terdiri dari empat aktor. Sedangkan peran setiap *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang diantaranya yaitu KOMPEPAR berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan implementer. LMDH Hyang Dora berperan sebagai koordinator dan fasilitator. BUMDes Kujang Mandiri berperan sebagai fasilitator dan implementer. Masyarakat Desa Leuwikujang berperan sebagai fasilitator dan implementer. Pemerintah Desa Leuwikujang berperan sebagai *policy creator*, koordinator, dan fasilitator. Perum Perhutani KPH Majalengka berperan sebagai fasilitator. DISPARBUD Kabupaten Majalengka berperan sebagai *policy creator* dan koordinator. POKDARWIS Kabupaten Majalengka berperan sebagai koordinator. Karang Taruna Putra Kujang berperan sebagai fasilitator. BPD Leuwikujang berperan sebagai fasilitator. LPMD Leuwikujang berperan sebagai fasilitator.

Kategori *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yaitu dalam posisi *Subject* (Subjek) terdiri dari empat *stakeholders*, dalam *Key Player* (Pemain Kunci) terdiri dari tiga *stakeholders*, dan *Crowd* (Pengikut Lain) terdiri dari satu *stakeholders*, sedangkan *Content Setter* (Pendukung) terdiri dari tiga *stakeholders*. Hubungan *stakeholders* dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang ditemukan melalui wujud kemitraan mutualistik diantaranya BPD Leuwikujang, LPMD Leuwikujang, Karang Taruna Putra Kujang, serta masyarakat dengan pemerintah Desa Leuwikujang, Pemerintah Desa Leuwikujang berkolaborasi dengan DISPARBUD Majalengka, LMDH Hyang Dora dengan Perum Perhutani Majalengka, LMDH Hyang Dora dengan KOMPEPAR, BPD Leuwikujang, LPMD Leuwikujang, Karang Taruna Putra Kujang, dan masyarakat berkolaborasi dengan KOMPEPAR, POKDARWIS Kabupaten Majalengka berkolaborasi dengan KOMPEPAR, dan KOMPEPAR dengan BUMDes Kujang Mandiri dan Perum Perhutani Majalengka.

Daftar Pustaka

- Arafat, S. Y., Priyadi, B. P., & Rahman, .Amni Zakarsyi. (2022). Analisis Peran Aktor Dalam Pengembangan Obyek Wisata Umbul Susuhan di Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. *Journal of Public Policy And Management Review*, 11(3).
- Ardiansyah, I. (2021). Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Kabupaten Bogor. *Eduturisma*, VI(1), 1–8.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234.
- Briliyanti, A. R. (2021). Peranan Organisasi Sosial Di Tingkat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Alam (Studi di Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar). Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Chrismawati, Y., & Pramono, R. W. D. (2021). Pemetaan Stakeholder Yang Berperan Dalam Pengembangan Agrowisata Minapadi Samberembe. *Jurnal Riset Pembangunan*, 4(1), 26–46.
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada

- Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6, 1–13.
- Harlyandra, Y., & Kafaa, K. A. (2021). Kolaborasi Multi-Stakeholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility Dalam Penanganan Sampah Di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 6(1), 54–68.
- Hekmatyar, V. (2021). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Sosial di Desa Pejambon, Sumberrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2), 155–166.
- Hidayah, N. A. (2018). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. In *Universitas Lampung Bandar Lampung*.
- Junaid, I., & M. Salim, M. A. (2019). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *PUSAKA (Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event)*, 1(1), 1–7.
- Maulina, L., Kuswandi, D., Irani, S. Y., Daniati, H., & Rosiana, E. (2022). Pengelolaan Desa Wisata Pandanrejo Menuju Desapreneur. *Media Wisata*, 20(2), 233–248.
- Muslimawati, A. T., & Setiyono, B. (2023). Peran Multi Stakeholder Dalam Pengembangan Kemitraan Desa Wisata Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Benowo, Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 12(4).
- Pantiyasa, I. W. (2020). Evaluasi Pengelolaan Desa Wisata Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(2), 109–129.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. (n.d.).
- Radic, U. S., & Kuswandi, A. (2021). Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan APBD Di Kabupaten Indramayu. *Governance*, 9(2), 113–123.
- Saifuddin Yunus, Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Y. Jamali (Ed.); Vol. 31, Issue 2). Bandar Publishing.
- Sari, S. P. W., & Rifai, A. (2020). Pengelolaan Desa Wisata Hutan Mangrove Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 121–138.
- Subhan, M., Meiwanda, G., & Arya Putri, R. (2022). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439–454.
- Talib, D. (2020). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Destinasi Wisata. *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)*, 3(1), 12–18.
- Vani, R. V., Priscilia, S. O., & Adianto, A. (2020). Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 63–70.
- Wibowo, I. N. A. (2019). Strategi Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 91–96.
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., S, H.

E., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar, M., Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). *Buku Pedoman Desa Wisata* (Edisi II,). Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.